

Peran Gender dalam Kegiatan Pertanian di Nagari Api-Api Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Yurike^{1*}, Yudha Saktian Syafruddin²

^{1*}Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

²Rimbo Pangan Lestari, Nagari Sirukam Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia

Email: ^{1*}yurike@unib.ac.id, ²xianyou@gmail.com

Abstract

The agricultural sector in Indonesia plays an important role in the economy, but there is still significant gender inequality in women's access and participation. This study was conducted in Nagari Api-Api Pasar Baru, Bayang District, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra. This study aims to analyze the roles of men and women in agriculture and the factors causing gender inequality. The study used a qualitative approach with Harvard model gender analysis. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were taken from related agencies and literature. The results of the study show that men's roles are more dominant in agricultural work that requires physical labor, while women more often work as farm laborers with lower wages and limited involvement in decision-making. Although the Minangkabau customary system places land ownership in the hands of women, its management is still dominated by men. The low level of education of women also limits their access to agricultural resources, technology, and training. Differences in wages and workloads show significant gender bias. Cultural factors and gender stereotypes reinforce this inequality, hindering women's opportunities in the agricultural sector. Therefore, more inclusive policies are needed to improve women's access to resources and equal opportunities in decision-making, training, education, and agricultural technology to reduce gender gaps and improve the welfare of female farmers.

Keywords: Agriculture, Gender, Minangkabau, Role, Women's Empowerment.

Abstrak

Sektor pertanian di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, namun masih terdapat ketimpangan gender yang signifikan dalam akses dan partisipasi perempuan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Api-Api Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laki-laki dan perempuan dalam pertanian serta faktor penyebab ketimpangan gender. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis gender model Harvard. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari instansi terkait dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran laki-laki lebih mendominasi dalam pekerjaan pertanian yang membutuhkan tenaga fisik, sementara perempuan lebih sering bekerja sebagai buruh tani dengan upah lebih rendah dan keterlibatan terbatas dalam pengambilan keputusan. Meskipun sistem adat Minangkabau menempatkan kepemilikan lahan di tangan perempuan, pengelolaannya tetap didominasi oleh laki-laki. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan turut membatasi akses mereka terhadap sumber daya, teknologi, dan pelatihan pertanian. Perbedaan upah dan beban kerja menunjukkan bias gender yang signifikan. Faktor budaya dan stereotipe gender memperkuat ketimpangan ini, menghambat peluang perempuan dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan, pelatihan, Pendidikan, serta teknologi pertanian guna mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan petani perempuan.

Kata Kunci: Pertanian, Gender, Minangkabau, Peran, Pemberdayaan Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Indonesia termasuk sektor utama dalam kegiatan ekonomi Indonesia, karena sektor pertanian berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor, penyedia bahan baku bagi industri, serta penanggulangan kemiskinan (Mile, 2011). Lebih dari 50% penduduk menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Dari 23 juta kepala keluarga petani, sebagian besar dari mereka adalah perempuan, istri atau ibu yang juga terlibat di sektor pertanian (Sitanggang, 2020). Jumlah perempuan itu sendiri sebanyak 49,66 % (118 juta lebih), hampir separuh dari jumlah penduduk nasional 237,6 juta, atau hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki 50,34% (119 juta lebih) (Suara Pembaruan, 2013).

Banyak isu gender yang ditemukan di bidang pertanian yang berkaitan dalam hal akses terhadap peluang dan kesempatan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, serta perolehan manfaat dari hasil-hasil pembangunan (Singh & Sharma, 2012). Untuk sumberdaya tanah pertanian, pada umumnya laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai petani mempunyai akses yang sama terhadap peluang dan kesempatan, partisipasi dalam lahan pertaniannya (Cotula, 2002). Namun, meskipun ada kesetaraan dalam akses dan partisipasi, masih terdapat tantangan signifikan yang dihadapi perempuan petani, termasuk diskriminasi gender yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses kredit, pelatihan, dan teknologi modern.

Dalam pelaksanaan usaha tani padi mulai tahapan pengolahan lahan, penanaman hingga pemetikan hasil memungkinkan terserapnya tenaga kerja laki-laki dan perempuan (Tisch & Paris, 2010). Adanya kultur masyarakat yang menempatkan perempuan dengan perspektif tertentu mengakibatkan terjadinya bias gender dalam kegiatan usaha tani padi. Pengolahan lahan pertanian didominasi hanya tenaga kerja laki-laki, begitu juga untuk menyiangi dan pemupukan melibatkan tenaga kerja laki-laki. Keadaan ini didasarkan pada pemahaman atas dasar tenaga kerja laki-laki yang lebih kuat, sehingga sangat tepat untuk keperluan mencangkul maupun mengoperasikan traktor (Horst & Marion, 2019). Demikian halnya untuk pekerjaan penyiangi dan pemupukan yang menganggap bahwa laki-laki lebih punya kecepatan dan kelincahan sehingga pekerjaan tersebut diduga akan lebih cepat diselesaikan oleh laki-laki. Sebaliknya kegiatan penanaman dan pemanenan banyak didominasi tenaga kerja perempuan.

Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Sumatera Barat tercatat sebesar 0,425, turun 0,005 poin dibandingkan tahun 2022 (BPS, 2023). Meskipun IKG menunjukkan tren perbaikan, sektor pertanian di Sumatera Barat masih menunjukkan ketimpangan gender yang signifikan. Data dari Kabupaten Agam menunjukkan bahwa jumlah laki-laki yang bekerja di sektor pertanian dua kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan tenaga fisik yang lebih tinggi dalam pekerjaan pertanian, yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki (Dinas Dalduk KB P2PA Kabupaten Agam, 2023). Partisipasi perempuan dalam tenaga kerja pertanian terbatas, dengan pendidikan dan faktor regional secara positif mempengaruhi peluang kerja mereka (Irfan et al., 2024).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan bahwa peran perempuan di bidang pertanian seringkali dinilai terlalu rendah, mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan profesional mereka (Kis et al., 2024). Petani perempuan menghadapi hambatan dalam mengakses lahan, kredit, dan teknologi, yang membatasi produktivitas mereka dibandingkan dengan rekan laki-laki (Agarwal, 2015). Hanya 3,6% perempuan yang diberdayakan dalam produksi ternak,

menyoroti perlunya peningkatan akses ke sumber daya dan kekuatan pengambilan keputusan (Villano et al., 2024).

Nagari Api-API Pasar Baru merupakan nagari yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian. Nagari api-api sendiri secara administrasi masuk ke dalam Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki topografi datar dan berbukit-bukit sebagai perpanjangan dari bukit barisan dengan tinggi berkisar 2-20 meter diatas permukaan laut.

Masyarakat Nagari Api-API Pasar Baru menganut kepercayaan agama Islam dan bersuku Minangkabau. Di Minangkabau itu sendiri kepemilikan lahan pada dasarnya atas nama perempuan, karena perempuan di Minangkabau dianggap sebagai ahli waris semua aset yang dimiliki oleh kaumnya. Sedangkan laki-laki di Minangkabau tidak mendapatkan apa-apa selain gelar dan kedudukan yang diberikan oleh pemangku adat. Namun, dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan cenderung dilakukan oleh laki-laki sedangkan perempuan mengikuti kebijakan yang telah dibuat. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik petani di Nagari Api-API Pasar Baru Api-API Pasar Baru dan menganalisis peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pertanian serta faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan gender dalam kegiatan pertanian di Nagari Api-API Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Api-API Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (Jamshed, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat setempat, serta menggali makna dan pengalaman individu dalam konteks budaya dan lingkungan mereka.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam aktifitas pertanian sebagai informan kunci dalam penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini pengambilan informan kunci dilakukan secara purposive sampling sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu pihak yang paham dan mengerti tentang pengelolaan sumberdaya alam atau pertanian (Tongco, 2007). Responden pada penelitian ini adalah rumah tangga petani di Nagari Api-API Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan.

Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan objek penelitian, data penelitian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses perolehan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara (Buriro et al., 2017)

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan data yang diperoleh dari dokumen dari instansi atau lembaga terkait dan responden sendiri.

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis gender model Harvard. Analisis Harvard digunakan untuk yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pembagian kerja berbasis gender, serta akses dan kontrol yang ada pada “profil aktifitas” dan “profil akses dan kontrol” dalam aktivitas pertanian (Croppenstedt et al., 2013). Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat (Rao et al., 1991). Analisis gender dapat disimpulkan sebagai suatu proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Neuendorf, 2011). Analisis Model Harvard atau Kerangka Analisis Harvard, dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development, bekerja sama dengan Kantor Women in Development (WID) – USAID. Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Tujuan kerangka Harvard adalah untuk: (1) Menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan maupun laki - laki, secara rasional, (2) Membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh, (3) Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal, (4) Memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

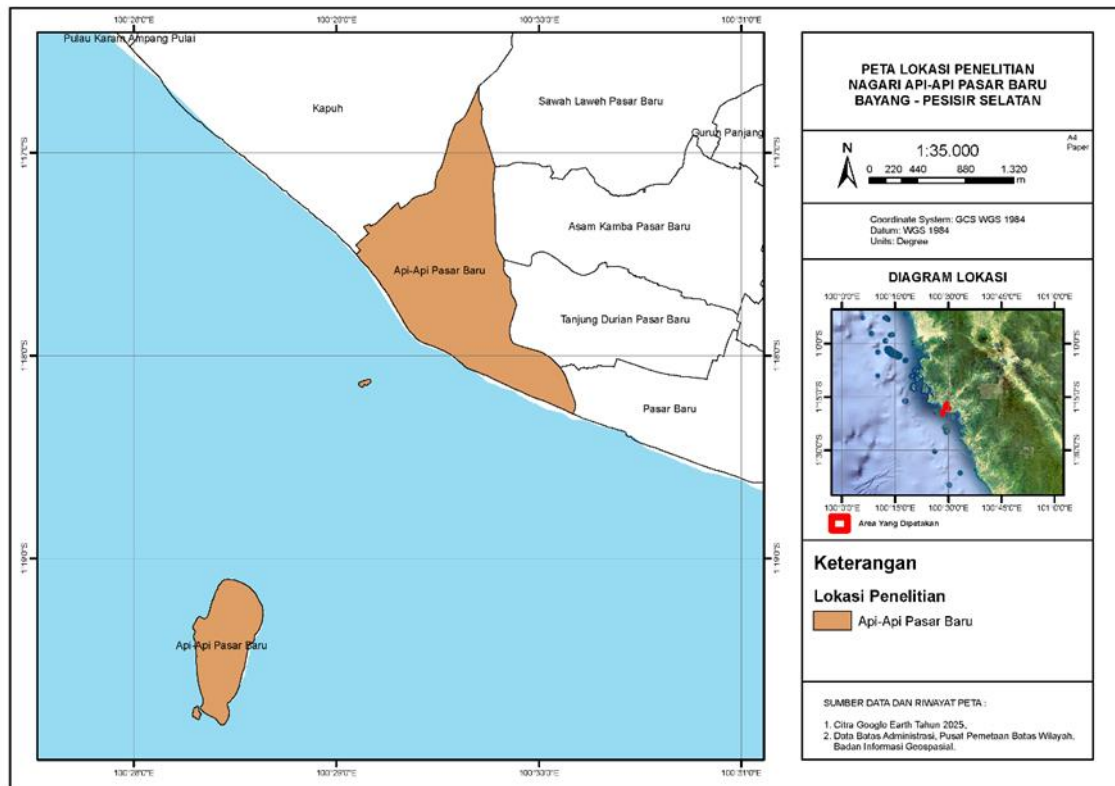
3.1 Gambaran Umum Wilayah

Nagari Api-api pasar baru termasuk dalam dataran rendah, yang memiliki luas wilayah 5 Km² dengan luas hutan desa 1,5 Km². Jumlah penduduk nagari ini 2.291 jiwa, dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki 1.152 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.139 jiwa. Dengan total Kepala keluarga (KK) berjumlah 625 KK diantara 145 KK dikepalai oleh perempuan. Selain itu di nagari ini juga ada penduduk pendatang yang berjumlah 23 jiwa, dan penduduk yang pergi berjumlah 53 jiwa (Arsip Nagari Api-Api, 2016).

Mata pencarian masyarakat di nagari ini diantaranya sebagai petani, nelayan, buruh tani/nelayan, pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta dan wiraswasta. Namun yang paling banyak masyarakat disini sebagai petani, dengan jumlah 301 jiwa diantaranya 181 jiwa laki-laki dan 120 jiwa perempuan. Selanjutnya sebagai buruh tani/nelayan yang berjumlah 256 jiwa diantaranya 130 jiwa laki-laki dan 126 jiwa perempuan. Sisanya Wiraswasta 86 jiwa (48 laki-laki 38 perempuan), PNS 74 jiwa (33 laki-laki 41 perempuan), pegawai swasta 25 jiwa (17 laki-laki 8 perempuan) dan Nelayan 67 jiwa semuanya laki-laki (Arsip Nagari Api-Api, 2016).

Di Nagari api-api terdapat Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang bernama Api-Api Sepakat, yang didalamnya terdapat 7 kelompok tani serta 2 diantaranya merupakan Kelompok Wanita Tani (KWT). Dalam struktur kelompok tani tersebut peran perempuan pada umumnya sebagai sekretaris dan bendahara sedangkan ketuanya tetap laki-laki. Kecuali pada KWT yang memang seluruh strukturnya merupakan perempuan.

Perempuan sebagai bendahara dan sekretaris dikarenakan perempuan dianggap lebih teliti dan lebih biasa dalam memmanagement keuangan. Sedangkan laki-laki lebih terbiasa dalam memimpin. Pada Gambar 1 merupakan peta Nagari Api-Api.



Gambar 1. Peta Nagari Api-Api

3.2 Karakteristik Responden

Karakteristik jenis pekerjaan, usia, dan pendidikan sangat relevan dalam kajian gender di sektor pertanian karena mencerminkan bagaimana struktur sosial dan ekonomi memengaruhi peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan dibandingkan laki-laki. Kajian ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif untuk mengurangi ketimpangan gender di sektor pertanian.

a. Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan menunjukkan bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam rantai nilai pertanian. Secara umum, laki-laki lebih banyak terlibat dalam pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik tinggi (misalnya, pengolahan lahan dan panen), sementara perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan yang dianggap sebagai "pendukung" (misalnya, penyiangan, pasca-panen, dan pengolahan hasil). Dalam deskripsi karakteristik responden, dikelompokkan menurut jenis pekerjaan responden yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 1. Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	3 orang	1 orang
2	Buruh tani	1 orang	5 orang

Berdasarkan hasil wawancara yang merujuk pada responden dari rumah tangga petani dapat dilihat bahwa aktifitas bertani dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pekerjaan sebagai petani sebagian besar dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya bekerja sebagai buruh tani. Karakteristik ini menunjukkan adanya pembagian peran gender dalam sektor pertanian, dimana laki-laki cenderung mengambil posisi yang lebih dominan sebagai petani, sementara perempuan berkontribusi sebagai tenaga kerja pendukung. Pembagian peran ini mencerminkan struktur sosial yang ada dalam masyarakat, di mana norma-norma gender sering kali mempengaruhi jenis pekerjaan yang dijalani oleh individu. Peran gender yang terlihat dalam sektor pertanian ini tidak hanya berdampak pada distribusi pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan peluang pengembangan bagi masing-masing gender. Kondisi ini sering kali mengakibatkan ketimpangan dalam akses perempuan terhadap pelatihan, teknologi pertanian, dan dukungan keuangan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka (Applefield & Jun, 2014).

b. Usia Responden

Usia mencerminkan fase kehidupan seseorang dalam pekerjaan pertanian. Faktor ini penting untuk melihat apakah ada perbedaan peluang dan tantangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok usia. Karakteristik responden menurut umur dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. Usia responden

Usia responden	Jumlah (orang)
<20	1
20-55	7
>55	2

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa rata-rata umur responden adalah berkisar antara 20-55 tahun. Usia produktif menurut BPS yaitu penduduk yang berusia mulai dari 15-64 tahun, sedangkan usia non produktif ialah penduduk yang berusia 15 tahun kebawah dan 64 tahun ke atas. Semakin produktif seseorang akan mempengaruhi pengambilan keputusan, sikap dan tanggapan dalam hal ini adalah pemanfaatan potensi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan bagi keluarga. Karakteristik umur responden ini menunjukkan bahwa mayoritas berada dalam rentang usia yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga sangat penting untuk memahami dinamika serta kebutuhan kelompok usia tersebut.

c. Pendidikan responden

Tingkat pendidikan menunjukkan pengetahuan dan daya pikir yang dimiliki oleh seorang responden. Pendidikan berpengaruh terhadap akses individu terhadap informasi, teknologi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam sektor pertanian. Adapun secara konseptual tingkat pendidikan adalah “urutan pendidikan formal yang pernah ditempuh seseorang mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Deskripsi profil responden menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
SD	5
SMP	2
SMA	3
SARJANA	0
Tidak sekolah	0

Dari hasil penelitian rata-rata tingkat pendidikan responden adalah sebanyak 5 orang merupakan lulusan Sekolah Dasar, 2 orang lulusan SMP, 3 orang lulusan SMA dan tidak ada yang lulusan Sarjana. Hal ini menunjukkan pendidikan dan pengetahuan responden memiliki keragaman dan rata-rata pendidikan yang dimiliki responden masih rendah. Tingkat pendidikan akan mengubah sikap dan cara berpikir ke arah yang lebih baik, dan juga tingkat kesadaran yang tinggi yang akan memberikan kesadaran lebih tinggi berwarganegara serta memudahkan bagi pengembangan (Shahnaz et al., 2022).

Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Hal ini juga berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan usaha tani (Hagar & Haythornthwaite, 2005). Sehingga dapat dikatakan tinggi atau rendahnya pengetahuan seseorang akan mempengaruhi terhadap situasi dan kondisi disekitarnya. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam pengelolaan pertanian.

3.3 Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kegiatan Pertanian

Dalam kegiatan pertanian, pada umumnya laki-laki memiliki peran yang besar dibanding dengan perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya dominan dilakukan oleh laki-laki. Pada kasus ini laki-laki cenderung memiliki akses dalam mengelola lahan pertanian meskipun kepemilikan lahan tersebut adalah milik perempuan.

Kepemilikan lahan pada nagari ini dimiliki kaum perempuan sedangkan laki-laki (suami atau saudara dari perempuan) sebagai pengelolanya. Lahan pertanian yang dimiliki pada umumnya merupakan harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun yang digunakan untuk membantu perekonomian anggota keluarga yang kurang mampu.

Di Nagari Api – Api jarang ditemui perempuan yang mengelola lahan miliknya sendiri. Pada umumnya lahan memang diserahkan kepada suami mereka untuk dapat dikelola dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun perempuan juga terlibat dalam sektor pertanian. Keterlibatan perempuan secara langsung pada umumnya dilakukan dengan menjadi buruh tani pada sawah milik orang lain. Aktifitas menjadi buruh tani dilakukan para petani wanita adalah untuk berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan rumahtangganya. Pada umumnya perempuan yang memilih menjadi buruh tani adalah mereka yang tidak memiliki lahan untuk dikelola. Berdasarkan Tabel 1. sebanyak 50 % perempuan bekerja sebagai buruh tani dan laki-laki hanya 10%.

Sebagian masyarakat juga ada menggunakan sistem bagi hasil (Patigan), dimana si pemilik lahan memberikan kuasa penuh kepada orang lain untuk mengolah lahannya. Mulai dari persiapan hingga panen ditanggung penuh oleh si pengelola, dan si pemilik lahan akan menerima hasil bersih sebesar seperempat bagian dan si pengelola akan mendapatkan tigaperempat bagian dari total hasil produksi. Misalnya, Si pengelola mendapatkan hasil panen 1000 sukek (1 sukek = 2,5 kg gabah basah) maka si pengelola akan memberikan patigan sebesar 250 sukek kepada si pemilik lahan.

Pengelola juga menggunakan jasa buruh dalam pengelolaan lahannya. Mulai dari persiapan lahan seperti membajak, menanam benih, menyiangi, memanen, serta pemisahan gabah biasanya mempekerjakan buruh tani. Buruh tani tersebut akan mendapatkan upahnya per hari. Dalam pembagian kerja laki-laki bertugas dalam membajak, membuat pematang sawah, memupuk, menyemprot hama, memanen, serta memisahkan gabah dari batang padi. Sedangkan perempuan bertugas untuk menyiangi gulma, menanam benih, menjemur gabah, artinya perempuan dipekerjakan kerjaan yang

ringan-ringan saja, tidak memerlukan banyak tenaga. Dalam mendapatkan upah laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Jam kerjanya pun tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapatkan upah antara Rp.70.000 hingga Rp.100.000 dan mendapatkan tambahan seperti rokok, makan siang, kopi, dan cemilan untuk jam kerja dari pukul 8.00 WIB – 16.00 WIB (lebih kurang 8 jam kerja). Sedangkan perempuan hanya mendapatkan upah antara Rp.35.000 hingga Rp.60.000 dan hanya mendapatkan kopi dan makan siang untuk jam kerja dari pukul 7.00 WIB – 14.00 WIB (lebih kurang 7 jam).

Dengan jam kerja antara laki-laki dan perempuan yang selisih 1 jam upah minimum laki-laki bahkan hampir dua kali lipat dari upah maksimum perempuan. Meski pada dasarnya bisa saja dilakukan oleh perempuan apa yang dikerjakan oleh laki-laki untuk mendapatkan upah lebih namun dikarenakan perspektif masyarakat bahwa pekerjaan seperti itu merupakan kerjaan laki-laki maka tidak dilakukan oleh perempuan.

Dalam kegiatan diskusi maupun pelatihan perempuan tetap diikutsertakan meskipun tidak semua perempuan yang diikutsertakan mau mengikuti kegiatan dikarenakan mereka merasa jika mengikuti kegiatan maupun pelatihan akan mengakibatkan terlantarnya tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga. Serta perempuan yang mengikuti kegiatan maupun pelatihan pada umumnya hanya menjadi pendengar dan tidak terlalu berperan aktif dalam kegiatannya.

Aktivitas perempuan menjadi lebih banyak ketika dihadapkan dengan pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh perempuan. Namun faktor ekonomi merupakan dorongan utama yang membuat perempuan harus memilih untuk terlibat dalam kegiatan pertanian. Dalam aktivitas rumah tangga perempuan pun memiliki kewajiban mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Segala keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan sebagainya dilakukan oleh perempuan. Beban kerja yang di terima perempuan lebih besar dibanding laki-laki.

Gender pada tingkat rumah tangga pertanian De jure menyatakan bahwa laki-laki menjadi kepala keluarga pada rumah tangga pertanian baik itu rumah tangga tanaman pangan, hortikultura, palawija dan peternak, nelayan, serta kehutanan dan perkebunan yang merupakan struktur patriarki berakibat pada status perempuan dalam rumah tangga pertanian dianggap hanya sebagai pekerja keluarga tanpa upah. Padahal kenyataan menunjukkan sekitar 10 % rumah tangga pertanian dikepalai perempuan.

De jure tersebut disertai nilai budaya gender yang mengakar kuat pada berbagai lapisan masyarakat termasuk birokrat dan teknokrat telah menjadikan program pembangunan bias laki-laki. Selanjutnya, ini menyebabkan pada akses perempuan rendah terhadap aset produksi (lahan usaha tani/kebun/hutan, ternak. Perahu motor, alat penangkapan ikan modern), kredit bagi pembelian input produksi maupun pengembangan usaha tani serta penyuluhan dan pelatihan IPTEK pertanian sangat bias laki-laki.

Sekalipun belum dibuktikan secara empiris, stereotipe bahwa laki-laki pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pekerja sambilan membawa pada anggapan bahwa produktivitas perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Ini berakibat pada rendahnya upah perempuan dibanding laki-laki.

Nilai upah buruh berbentuk makanan (di luar upah resmi) bagi perempuan kualitasnya lebih rendah dari laki-laki, sementara itu buruh laki-laki juga memperoleh rokok. Hal ini bertambah buruk lagi manakala perempuan berasal dari lapisan miskin di pedesaan yang karena posisi tawar mereka terhadap petani pemilik/penyewa rendah, menyebabkan perempuan bersedia memburuh dengan upah lebih rendah lagi. Bahkan pada kasus-kasus tertentu perempuan tidak memperoleh upah atas pekerjaannya membantu majikan suaminya, karena mereka menjadi jaminan bagi peluang bekerja suaminya. Ketidakadilan ini mencerminkan struktur sosial yang mendiskriminasi

perempuan, dan memperkuat siklus kemiskinan serta ketergantungan ekonomi (Bastos et al., 2009). Dalam konteks ini, penting untuk mengadvokasi kesetaraan gender dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi agar mereka dapat memperoleh hak-hak yang sama dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Wekwete, 2014). Pemberdayaan perempuan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Selama ini lebih rendahnya akses perempuan daripada laki-laki terhadap lahan pertanian/aset produksi pada keluarga petani yang mayoritas beragama Islam dimungkinkan oleh adanya distribusi/alokasi harta dalam rumah tangga petani yang cenderung diatur oleh sistem pewarisan yang belum banyak melalui pelebagaan "hibah", yaitu mengalokasikan harta secara setara antara laki-laki dan perempuan. Penerapan sistem hibah ini dapat membantu mengubah paradigma tradisional dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Meinzen-Dick et al., 2011). Dengan demikian, peningkatan akses perempuan terhadap aset produksi tidak hanya akan memberdayakan mereka secara individu, tetapi juga berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilitas ekonomi di tingkat komunitas (Ogato et al., 2009). Sistem ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik antara anggota keluarga, menciptakan lingkungan di mana semua individu merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan dan sumber daya.

Lebih rendahnya tingkat pendidikan anggota rumahtangga pertanian perempuan daripada laki-laki menyebabkan lebih rendahnya akses perempuan terhadap pekerjaan di sektor pertanian dan/atau di sektor informal yang memungkinkan mereka memperoleh upah yang pantas/tinggi dan skema kredit dari pemerintah. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dalam bidang pertanian dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan ini, memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik (Jones, 2012). Dengan demikian, program-program yang mendukung pendidikan dan pelatihan bagi perempuan harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga petani serta memperkuat posisi mereka di pasar kerja.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender yang signifikan dalam sektor pertanian di Nagari Api-API Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Laki-laki mendominasi akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan lahan pertanian, meskipun secara budaya kepemilikan lahan di Minangkabau berada di tangan perempuan. Perempuan lebih sering terlibat sebagai buruh tani, mengerjakan pekerjaan dengan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun beban kerja mereka lebih besar karena harus mengelola tugas rumah tangga di samping aktivitas pertanian.

Budaya patriarki dan stereotipe gender yang kuat memperkuat ketimpangan ini, di mana laki-laki dipandang sebagai pemimpin dan pengelola utama, sedangkan perempuan dianggap sebagai pekerja tambahan atau pendukung. Hal ini tidak hanya memengaruhi akses perempuan terhadap sumber daya pertanian, tetapi juga membatasi partisipasi mereka dalam pelatihan, teknologi, dan program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan turut menjadi hambatan besar dalam memperbaiki posisi mereka dalam sektor ini. Pendidikan yang terbatas mengurangi kemampuan perempuan untuk mengakses peluang yang lebih baik dan memperjuangkan hak-hak mereka. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan kebijakan yang inklusif dan berbasis gender yang tidak hanya meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya, tetapi juga memberikan peluang yang setara dalam pengambilan keputusan, pelatihan, dan teknologi. Perubahan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan juga menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan gender di sektor pertanian.

REFERENCES

- Agarwal, B. (2015). *Food Security, Productivity and Gender Inequality*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/OXFORDHB/9780195397772.013.002>
- Applefield, A., & Jun, J. (2014). *Working with Women: An Essential Component of Global Food Security and Agricultural Development*. The Fletcher Forum of World Affairs.
- Bastos, A., Casaca, S. F., Nunes, F., & Pereirinha, J. A. (2009). Women and poverty: A gender-sensitive approach. *Journal of Socio-Economics*. <https://doi.org/10.1016/J.SOCEC.2009.03.008>
- Buriro, A. G., Awan, J. H., & Lanjwani, A. R. (2017). Interview: A Research Instrument for Social Science Researchers. *International Journal of Social Sciences*
- Cotula, L. (2002). *Gender and Law: Women's Rights in Agriculture*.
- Croppenstedt, A., Goldstein, M., & Rosas, N. (2013). Gender and agriculture : inefficiencies, segregation, and low productivity traps. World Bank Research Observer. <https://doi.org/10.1093/WBRO/LKS024>
- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Agam (Dinas Dalduk KB P2PA Kabupaten Agam). 2023. *Data Perspektif Gender Kabupaten Agam Tahun 2023*. Tim Penyusun Data Perspektif Gender Kabupaten Agam.
- Hagar, C., & Haythornthwaite, C. (2005). Crisis, farming and community. *Journal of Community Informatics*
- Horst, M., & Marion, A. (2019). Racial, ethnic and gender inequities in farmland ownership and farming in the U.S. *Agriculture and Human Values*. <https://doi.org/10.1007/S10460-018-9883-3>
- Irfan, M. U., Yeniwati, Y., & Anis, A. (2024). Analisis Sosial Ekonomi Terhadap Pasar Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Sumatera Barat. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.24036/ecosains.13123157.00>
- Jamshed, S. Q. (2014). Qualitative research method-interviewing and observation. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*. <https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942>
- Jones, M. (2012). First Global Conference on Women in Agriculture (GCWA). *Food Security*. <https://doi.org/10.1007/S12571-012-0188-X>
- Kis, M., Fitriani, W., Mahmuda, M., & Almunawar, Z. (2024). Gender Indicators Social and Responsibility Statistical Center of Sumatera West. *Agenda*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.31958/agenda.v6i1.12578>
- Meinzen-Dick, R., Johnson, N. L., Quisumbing, A. R., Njuki, J., Behrman, J. A., Rubin, D., Peterman, A., & Waithanji, E. M. (2011). *Gender, Assets, and Agricultural Development Programs: A Conceptual Framework*.
- Mile, C. (2011). *Agricultural production and policy in indonesia in the last two decades – tasks and challenges*. *Regional and Business Studies*.

- Neuendorf, K. A. (2011). Content Analysis—A Methodological Primer for Gender Research. *Sex Roles*. <https://doi.org/10.1007/S11199-010-9893-0>
- Ogato, G. S., Boon, E. K., & Subramani, J. (2009). Improving Access to Productive Resources and Agricultural Services through Gender Empowerment: A Case Study of Three Rural Communities in Ambo District, Ethiopia. <https://doi.org/10.1080/09709274.2009.11906196>
- Rao, A., Anderson, M. B., & Overholt, C. (1991). Gender analysis in development planning.
- Shahnaz, R., Sharma, H. K., & Qamar, T. (2022). Impact of level of education on professional behaviour and economic growth of employees. <https://doi.org/10.5958/2229-4503.2022.00003.0>
- Singh, S., & Sharma, A. K. (2012). Gender issues for drudgery reduction and sustainable small holder farming in rice production system. *Journal of Hill Agriculture*.
- Sitanggang, M. N. (2020). Peran Perempuan dalam Keluarga Petani Pegunungan Tengger. <https://doi.org/10.24198/UMBARA.V3I1.25576>
- Tisch, S. J., & Paris, T. R. (2010). Labor Substitution in Philippine Rice Farming Systems: An Analysis of Gender Work Roles. *Rural Sociology*. <https://doi.org/10.1111/J.1549-0831.1994.TB00544.X>
- Tongco, M. D. C. (2007). Purposive Sampling as a Tool for Informant Selection. *Ethnobotany Research and Applications*. <https://doi.org/10.17348/ERA.5.0.147-158>
- Villano, R., Koomson, I., Thei, S., Taquiuddin, Moh., Prameswari, F. A., Fachry, A., Fatah, L., Sumantri, I., & Burrow, H. M. (2024). Women's empowerment in integrated cattle-farming systems in Indonesia. *Applied Economics*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2364090>
- Wekwete, N. N. (2014). Gender and Economic Empowerment in Africa: Evidence and Policy. *Journal of African Economies*. <https://doi.org/10.1093/JAE/EJT022>